

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)



Oleh:

RAHMI FADHILAH
NIM: 13050/2009

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Wisuda Periode Maret 2014

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)

Rahmi Fadhilah

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : amyvoomee@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan adalah proporsi kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, komite audit dan kualitas audit. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009 sampai 2011. Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 55 perusahaan sampel. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari www.idx.co.id dan website perusahaan.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5% maka hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* dengan koefisien β bernilai negatif 0,520 dan nilai dengan signifikansi $0,626 > 0,05$ (2) Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* dengan koefisien bernilai positif β 0,017 dan nilai dengan signifikansi $0,977 > 0,05$ (3) Komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* dengan koefisien β bernilai positif 0,390 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, (4) Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* dengan koefisien β bernilai negatif 0,008 dan nilai signifikansi $0,939 > 0,05$.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, disarankan: 1) Pemerintah hendaknya memberikan aturan yang jelas dan tegas antara penghindaran pajak yang diperbolehkan dengan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan. 2) Penelitian selanjutnya menggunakan variabel lain yang mempengaruhi *tax avoidance* di luar variabel penelitian ini.

Kata Kunci: *Corporate Governance, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit, Tax Avoidance, Book Tax Gap.*

Abstract

This study aims to examine the effect of corporate governance on the extent of tax avoidance with proxy book tax gap. Elements of corporate governance that are used to test are ownership structure, Independent Commissary proportion, audit committee and audit quality. This study considered causative research.

The population in this study was all companies listed on the Stock Exchange in 2009 until 2011. The sample was determined by the purposive sampling method and obtain 55 companies. Type of data used was secondary data obtained from www.idx.co.id and corporate websites. The method of analysis used is multiple regression analysis.

Based on the results of multiple regression analysis with a significance level of 5%, the results of this study concluded that: (1) ownership structure has no effect on tax avoidance with proxy book tax gap with the coefficient β is negative 0.520 and significance value $0.626 > 0.05$ (2) Independent Commissary proportion has no effect on tax avoidance with proxy book tax gap with the coefficient β is positive 0.017 and significance value $0.977 > 0.05$ (3) audit committee with the coefficient β is positive 0.390 and significance value $0.000 < 0.05$ and (4) audit quality has a negative effect with β coefficient is negative 0.008 and significance value $0.939 > 0.05$.

Based on the above results, it is suggested: 1) The government should establish a clear about tax avoidance and unacceptable tax avoidance. 2) Future studies using other variables that affect the tax avoidance beyond the study variables.

Keywords: *Corporate Governance, Ownership Structure, Independent Commissary Proportion, Audit Committee, Audit Quality, Tax Avoidance, Book Tax Gap.*

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*


(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2009-2011)

Oleh:
RAHMI FADHILAH
NIM: 13050/2009

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/thesis untuk persyaratan wisuda periode Maret 2014 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Januari 2014

Pembimbing I



Fefri Indra Arza, SE, MSc., Ak
NIP. 19730213 1999903 1 003

Pembimbing II



Salma Taqwa, SE, MSi., Ak
NIP. 19730723 200604 2 001

PENDAHULUAN

Pajak merupakan unsur penting dan bagi negara-negara yang ada di dunia ini, bahkan penting dalam rangka menopang anggaran penerimaan negara. Di Indonesia penerimaan dari sektor pajak menempati persentase paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Oleh sebab itu pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara (Supramono, 2005:2). Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) selalu diartikan sebagai kegiatan legal. Namun permasalahannya saat ini adalah apakah penghindaran pajak atau *tax avoidance* selalu legal?

Menurut Rohatgi dalam Bambang: 2009, di banyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Penghindaran pajak dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan legal dan dapat juga dikategorikan sebagai kegiatan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai usaha yang baik. Dilakukannya *tax avoidance* sebagai suatu kesalahan alokasi yang terjadi di dunia nyata, kemerosotan etika bisnis, hilangnya independensi auditor dan interferensi dengan suatu sistem kendali.

Kegiatan *tax avoidance* akhir-akhir ini diperkirakan akan menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus. Di Indonesia sendiri pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing melaporkan rugi pada laporan keuangannya dan tidak membayar pajak dalam waktu 5 tahun berturut-turut, antara lain ditengarai karena praktik penghindaran pajak (Jakarta Kompas: 2005). Dan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan *tax avoidance* yakni dengan membayar pajak rata-rata 20% padahal pajak yang harusnya dibayarkan perusahaan mendekati 30% (Dyrenge dalam Judi: 2012).

Hal ini memunculkan anggapan luasnya literatur terkait dengan efek *good corporate governance* terkait penghindaran pajak ini terhadap pengambilan keputusan keuangan. Isu mengenai *good corporate governance* mulai mengemuka, ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Menurut *OECD* (*Organization for Economic Cooperation and Development*) dalam Solihin (2009), *corporate governance* sendiri merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* ada *internal* dan *external*. Mekanisme *Internal* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi Dewan Direksi, proporsi Dewan Komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan mekanisme *external* adalah seperti pengendalian oleh perusahaan, struktur kepemilikan, dan pengendalian pasar. Pada penelitian ini, penerapan *corporate governance* akan dilihat dari mekanismenya dengan proksi kepemilikan institusional, proporsi Dewan Komisaris Independen, komite audit dan kualitas audit.

Penerapan *corporate governance* juga dilatar belakangi oleh masalah struktur kepemilikan. Pada penelitian kali ini, struktur kepemilikan perusahaan akan difokuskan pada struktur kepemilikan institusional. Hal ini karena dengan adanya kepemilikan institusional maka akan ada kontrol yang lebih baik. Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajerial sehingga mengurangi konflik kepentingan manajemen. Investor institusional dapat mengurangi biaya hutang dengan mengurangi masalah keagenan, sehingga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.

Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan nasihat kepada

direksi (UU No.40 Tahun 2007). Dewan Komisaris sendiri terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris non-independen. Komisaris Independen merupakan Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan Komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Pengertian terafiliasi sendiri adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Keberadaan Dewan Komisaris Independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah agresifitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen (Wulandari: 2005).

Tanggung jawab Komite Audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Pada umumnya komite ini berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan dan pengendalian intern (Mayangsari: 2003). Kebijakan keuangan yang baik akan meningkatkan pertumbuhan laba yang baik bagi perusahaan, ini akan cenderung membuat perusahaan melakukan penekanan terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan terutama pajak.

Menurut prinsip-prinsip OECD dalam Frise (2006) bahwa betapa pentingnya untuk menganalisis interaksi antara *corporate governance* dengan sistem pajak. Salah satu prinsip utama yang disarankan oleh OECD untuk pembuat kebijakan *good corporate governance* adalah didasarkan pada keterbukaan dan transparansi. Menurut FCGI transparansi adalah mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

Transparansi dapat diukur dengan kualitas audit, pengukuran kualitas audit dapat dilakukan dengan menggunakan proksi spesialisasi industri dan ukuran KAP (Mayangsari: 2003).

Penelitian lain terkait pengaruh strategi perpajakan terhadap *corporate governance* menjelaskan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Sartori: 2010). Penelitian yang dilakukan oleh (Dyreg: 2010) hanya mengidentifikasi pengaruh dewan pimpinan perusahaan secara individu terhadap penghindaran pajak, tetapi belum memberikan jawaban tentang individu dengan karakter atau perilaku yang seperti apa yang memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: sejauhmana pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

TELAAH LITERATUR DAN KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Mardiasmo, 2002:1).

Hukum pajak menganut paham *imperatif*, yakni pelaksanaannya tidak dapat ditunda (Mardiasmo, 2002:4). Maka, jika pajak tidak dilaksanakan akan ada sanksi-sanksi yang akan di tetapkan oleh undang-undang bagi wajib pajak baik badan maupun pribadi. Dengan begitu juga perusahaan dengan giat-giatnya melakukan perlawanan yang aktif, perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak atau disebut juga dengan *tax avoidance* (Mardiasmo, 2002:9).

2. Pengertian *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. *Tax Avoidance* selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal (Bambang: 2009). Namun penghindaran pajak ini tidak selalu legal karena pada dasarnya *tax avoidance* dibedakan menjadi dua yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*) (Rohatgi dalam Bambang: 2009).

Jika tujuan dari *tax planning* ini adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan *unacceptable tax avoidance*, karena secara hakikat ekonomi keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba (Lumbantoruan dalam Suandy, 2008:6). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal (Suandy, 2008).

Tax Avoidance dapat terjadi di dalam undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang (Suandy: 2008).

Biasanya perusahaan melakukan strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, namun dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan (Suandy: 2008). Strategi penghematan pajak tersebut disebut juga sebagai suatu strategi pajak yang agresif (Crocker dan Slemrod: 2003).

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and*

Development (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak :

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization*, 1991).

Beberapa resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan *tax avoidance* antara lain: denda, publisitas dan reputasi (Friese: 2006). Sebuah pendekatan teoritis menekankan interaksi dari aktivitas *tax avoidance* dan problem agensi yang merekat pada perusahaan *go public* (Sartori: 2010).

Sekat yang membatasi legal dan ilegalnya suatu tindakan penghematan pajak dalam upaya *tax planning* masih sulit untuk dibedakan (Bovi: 2005), sehingga diharapkan perusahaan lebih baik mematuhi peraturan perpajakan dan tidak memanfaatkan ambiguitas dari peraturan perpajakan untuk kebaikan perusahaan di masa yang akan datang.

3. *Good Corporate Governance*

Pengertian *Corporate Governance*

Corporate Governance merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya (Hendra: 2012). *Cadbury Committee*, seperti dikutip oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), mengartikan *Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola)

perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Good Corporate Governance diartikan sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan *Corporate Governance* yang baik dan benar (GCG) akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah (Dwitridinda dalam Hendra: 2012).

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG):

a. Transparansi (*transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. Responsibilitas (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan

tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. Independensi (*independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Implementasi Prinsip Prinsip Good Corporate Governance

Implementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut telah dikelola dengan baik dan transparan. Hal tersebut dapat merupakan modal dasar bagi timbulnya kepercayaan publik sehingga perusahaan yang telah *go public* saham perusahaannya akan lebih diminati oleh para investor dan berdampak positif terhadap peningkatan nilai perusahaan atau harga saham, Arif (2008 : 142).

Elemen-Elemen Good Corporate Governance

Untuk membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam suatu perusahaan ada dua pihak yang diperlukan, yaitu komite audit dan dewan komisaris independen. Meskipun masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda namun pada prinsipnya kedua pihak mempunyai tujuan yang serupa, yaitu mewujudkan kehidupan bisnis yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab.

Mekanisme Good Corporate Governance

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang

saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko :2007).

Adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, maka pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Agresifitas pajak mengarah pada penghematan pajak, itu juga menyebabkan sebuah perusahaan potensial dikenakan sanksi oleh IRS terkait biaya pelaksanaan dan biaya agency (Chen: 2008). Fokus pada pengungkapan suka rela menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan, meramalkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis (Khurana: 2009).

2. Struktur Dewan Komisaris

Dewan direksi berfungsi untuk mengurus perusahaan, sementara dewan komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan. Selain itu, komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris.

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan, 2008).

Dengan demikian keberadaan komite audit dan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Mayangsari, 2003).

3. Komite Audit

Sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik (Daniri dalam Pohan: 2008). Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emitmen untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen. Sesuai dengan surat edaran yang ada sekurang-kurangnya komite audit dalam perusahaan terdiri atas tiga orang.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)

mendefinisikan komite audit sebagai berikut:

Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibantu oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada *common sense*, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui (Siallagan: 2006) menjelaskan:

- a) Pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal
- b) Penggunaan prinsip akuntansi berterima umum
- c) Mengawasi proses audit secara keseluruhan.

4. Kualitas Audit

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP.

Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham.

Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori: 2010). Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya.

Hal-hal yang berhubungan dengan kualitas audit antara lain (Deis dalam Suartana: 2007) memaparkan:

- a) Lamanya auditor / umur audit, semakin lama maka semakin rendah kualitas auditnya.
- b) Jumlah klien, semakin banyak maka semakin baik kualitas auditnya.
- c) Kesehatan keuangan klien, makin sehat ada kecenderungan klien menekan auditor untuk mengikuti standar yang berlaku.
- d) Review oleh pihak ketiga, kualitas audit semakin tinggi apabila direview oleh pihak ketiga.

Beberapa literatur telah membuktikan bahwa tingkat pajak yang tinggi akan diikuti dengan meningkatnya tingkat penghindaran dan penggelapan pajak.

Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Pohan 2008, penelitian ini meneliti mengenai pengaruh GCG, perataan laba terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik. Hasil penelitian ini kepemilikan manajerial, komisaris independen dan perataan laba mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan *tax evasion*.
2. Penelitian Annisa pada tahun 2010. Penelitian ini meneliti pengaruh GCG terhadap *tax avoidance* di perusahaan yang listed di BEI tahun 2008. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa mekanisme *corporate governance*

berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

3. Penelitian Dyreng pada tahun 2010. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi pengaruh pimpinan perusahaan terhadap penghindaran pajak. Namun dalam hasil penelitian ini belum memberikan jawaban pasti mengenai individu dengan karakter atau perilaku pimpinan yang seperti apa yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Penelitian Sartori pada tahun 2010, penelitian ini terkait pengaruh strategi perpajakan terhadap *corporate governance*. Hasil penelitian ini adalah apabila suatu perusahaan memiliki suatu mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memnuhi kewajiban perpajakannya.
5. Penelitian Judi tahun 2012 pada perusahaan manufaktur tahun 2006-2010. Penelitian ini meneliti tentang pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. Hasil dari pada penelitian ini disimpulkan bahwa eksekutif/pimpinan yang memiliki karakter *risk taker* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* namun sebaliknya karakter *low taker* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

KERANGKA KONSEPTUAL

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa *good corporate governance* adalah proses di mana pelaksanaan perusahaan dikendalikan dan diawasi. Ketika diskusi pelaksanaan usaha, maka perlu untuk memiliki sebuah gagasan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan utama perusahaan.

Secara khusus, *good corporate governance* menjadi faktor denominator penting dalam penilaian yang mengharapkan adanya penghematan pajak. Dalam penelitian ini yang akan dikaji terkait *good corporate governance* antara lain struktur kepemilikan,

struktur dewan, komite audit dan kualitas audit.

Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin kecil kepemilikan institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Kemudian kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen kerap kali bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan menekan biaya-biaya termasuk pajak. Sehingga dapat mendorong manajer menjadi agresif terhadap pajak.

Selain itu Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern kebijakan keuangan yang baik akan meningkatkan pertumbuhan laba yang baik juga bagi perusahaan.

Sehingga komite audit bertanggung jawab dalam mengendalikan manajer dalam meningkatkan pertumbuhan laba dimana nantinya manajer cenderung melakukan penekanan-penekanan terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan terutama pajak, ini akan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Begitu juga dengan kualitas audit berupa transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. Salah satu bentuk monitoring yang dapat menurunkan biaya agensi adalah audit. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang

saham. Peningkatan transparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas publik (Sartori:2010). Alasannya adalah adanya asumsi bahwa implikasi dari perilaku pajak yang agresif, pemegang saham tidak ingin perusahaan mereka mengambil posisi agresif dalam hal pajak dan akan mencegah tindakan tersebut jika mereka tahu sebelumnya. **Gambar 1. Kerangka Konseptual (lampiran).**

Hipotesis

Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

- H1: Konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap aktivitas *tax avoidance* yang dproksikan dengan *book tax gap*.
- H2: Persentase dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap aktivitas *tax avoidance* yang dproksikan dengan *book tax gap*.
- H3: Jumlah komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap aktivitas *tax avoidance* yang dproksikan dengan *book tax gap*.
- H4: Kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap aktivitas *tax avoidance* yang dproksikan dengan *book tax gap*

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Penelitian kausatif merupakan penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, di samping mengukur kekuatan hubungan. Penelitian ini menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek yang diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di BEI. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 131 perusahaan.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap

menggambarkan populasinya. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang berarti pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Pemilihan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* bertujuan untuk memperoleh sampel yang representatif berdasarkan kriteria tertentu.

Adapun kriteria sampel yang dikategorikan dalam penelitian ini adalah:

1. Terdaftar sebagai perusahaan manufaktur di BEI.
2. Perusahaan yang secara terus menerus melaporkan laporan keuangannya dari tahun 2009 sampai 2011.
3. Perusahaan manufaktur yang laba bersih sebelum pajaknya tidak mengalami kerugian selama tahun 2009-2011.
4. Perusahaan yang menyampaikan data secara lengkap selama periode pengamatan tahun 2009-2011 berkaitan dengan dewan komisaris, kepemilikan institusional, jumlah saham beredar, dan informasi KAP yang mengaudit perusahaan.
5. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan tidak mengalami *delisting* selama periode pengamatan.
6. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangannya dalam rupiah.
7. Memiliki peredaran bruto lebih dari Rp50 Milyar setahun

Berdasarkan pada **Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel (lampiran)**, maka perusahaan yang memenuhi kriteria dan dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 55 perusahaan yang ditunjukkan dalam **Tabel 2. Daftar Perusahaan Sampel (lampiran)**.

Jenis data dan sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data dokumenter berupa laporan keuangan tahunan perusahaan yang listed di BEI, selama periode 2009-2011. Sumber

data adalah data sekunder yang diperoleh dari website perusahaan maupun website BEI (www.idx.co.id).

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan melihat laporan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan sampel dari tahun 2009 sampai 2011. Data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), web-web resmi perusahaan sampel, dan dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik media cetak maupun elektronik.

Variabel Penelitian dan Pengukurannya Variabel Dependen (Y)

Merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah *tax avoidance* (Y). Pengukuran terkait *tax avoidance* dilakukan dengan menggunakan proksi *book tax gap* sebagai alat ukur. *Book tax gap* merupakan selisih antara laba sebelum pajak (laba akuntansi) dengan penghasilan kena pajak (laba fiskal) (Bovi: 2005). Karena pajak yang dibayar ke pemerintah tidak dapat diketahui secara langsung maka diperlukan suatu taksiran dengan pendekatan "*gross up*" (Manzon dan Plesko: 2002) yang juga dilakukan Desai: 2007).

Penghasilan kena pajak harus diestimasi karena tidak diketahui jumlahnya melalui beban pajak kini, lalu di *gross up* dengan tarif pajak (sesuai dengan tarif pajak badan peraturan undang-undang nomor 36 tahun 2008 sebesar 28% pada tahun 2009 dan 25% pada tahun 2010 dan seterusnya) untuk memperoleh estimasi laba kena pajak, kemudian laba kena pajak tersebut dikurangkan dari laba sebelum pajak untuk mengestimasi jumlah *book tax gap*.

$$\text{Laba kena pajak} = \left(\frac{\text{beban pajak kini}}{25\%} \right)$$

$$\text{BTG} = \text{EBT} - \text{Laba kena pajak}$$

Variabel Independen (X)

Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel bebas/dependen. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah *good corporate governance* yang terkait dengan struktur kepemilikan, transparansi informasi, komite audit dan proporsi Dewan Komisaris Independen.

a. Kepemilikan Institusional

Besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan agresif yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur menggunakan presentase (Khurana: 2009). Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{proporsi saham dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang diterbitkan}}$$

Kepemilikan institusional dilambangkan dengan **INST**.

b. Struktur Dewan Komisaris

Keberadaan variabel dewan komisaris yang menunjang kinerja perusahaan dan meningkatkan efektifitas aktifitas monitoring diukur dengan menggunakan persentase dewan komisaris yang ada dalam suatu perusahaan (Siallagan: 2006).

Dalam penelitian ini variabel struktur dewan komisaris diprosikan dengan persentase keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan (Mayangsari: 2003). Proporsi Dewan Komisaris Independen diukur dengan rasio sebagai berikut:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

Dewan Komisaris Independen dilambangkan dengan **INDP**.

c. Komite Audit

Kehadiran komite audit diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern (Mayangsari: 2003).

Dalam penelitian ini digunakan jumlah komite audit dalam suatu perusahaan

sebagai alat ukur dan dilambangkan dengan **KOMITE**.

d. Kualitas Audit

Kualitas audit biasa diukur berdasarkan besar kecilnya ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit pada suatu perusahaan (Widiastuty dan Febrianto), jika perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four*, maka akan lebih independen karena lebih dapat bertahan dari tekanan manajer untuk melaporkan adanya pelanggaran (Watts dalam Kurniasih: 2007).

Untuk penelitian ini perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* yaitu *Price Waterhouse Cooper-PWC*, *Deloitte Touche Tohmatsu*, *KPMG*, *Ernst & Young-E&Y* akan diberi nilai 1, dan apabila tidak diaudit oleh keempat Kantor Akuntan Publik (KAP) di bawah lisensi KAP *The Big Four* akan diberi nilai 0. Kualitas audit dilambangkan dengan **AUDIT**.

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis, maka analisis data ini bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Sebelum melakukan analisis regresi, ada beberapa syarat pengujian yang harus dipenuhi agar hasil olahan data benar benar menggambarkan apa yang menjadi tujuan penelitian yaitu :

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Pengujian ini meliputi :

a. Uji Normalitas Residual

Pengujian normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen maupun independen atau keduanya terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov (KS)* dengan kriteria pengujian $\alpha = 0,05$ dimana :

1. Jika $\text{sig} > \alpha$ berarti residual terdistribusi normal

2. Jika $\text{sig} < \alpha$ berarti residual tidak terdistribusi normal

b. Uji Multikolinearitas

Menurut Idris (2006) multikolinearitas merupakan suatu gejala korelasi antar variabel independen yang ditunjukkan dengan korelasi signifikan antar variabel independen. Adanya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance value atau nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas *tolerance value* adalah 0,1 dan batas VIF adalah 10. Apabila *tolerance value* $< 0,1$ atau $\text{VIF} > 10$ maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya apabila *tolerance value* $> 0,1$ atau $\text{VIF} < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi heteroskedastisitas dapat menggunakan uji *Glejser*. Apabila $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Menurut Ghazali (2007), model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak ada korelasi antar data berdasarkan urutan waktu. Metode yang digunakan adalah *Durbin Watson*. Menurut Idris (2006), kriteria pengujiannya sebagai berikut:

- Angka DW di bawah -2 maka terjadi autokorelasi positif
- Angka DW di antara -2 sampai dengan +2 maka tidak ada autokorelasi
- Angka DW di atas +2 maka terjadi autokorelasi *negative*

Model Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda, karena variabel bebas dalam penelitian ini lebih dari satu. Teknik analisis regresi berganda merupakan teknik uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen, dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{BTG} = \alpha_0 + \beta_1 \text{INST} + \beta_2 \text{INDP} + \beta_3 \text{KOMITE} + \beta_4 \text{AUDIT} + \varepsilon$$

Di mana :

BTG = *Book tax gap*.

INST = Kepemilikan institusional.

INDP = Persentase dewan komisaris independen.

KOMITE = Jumlah komite audit.

AUDIT = Kualitas audit

α = Konstanta Persamaan

Regresi

$\beta_{1, 2, 3, 4}$ = Koefisien Regresi

ε = Error term

Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit - Test*)

a. Uji koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) intinya mengukur tingkat ketepatan dari regresi linear berganda yaitu persentase sumbangan (*goodness of fit*) dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini digunakan *Adjusted R Square* karena variabel bebas yang digunakan lebih dari satu. Tujuan pengukuran *Adjusted R Square* adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

b. Uji F-statistik

Uji *F* ini dilakukan untuk menguji secara serentak variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, atau $\text{sig} < 0,05$, menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, atau $\text{sig} > 0,05$, menunjukkan bahwa model yang digunakan belum mampu menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α) 0.05.

Uji Hipotesis

Uji ini bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan

mengasumsikan variabel lain adalah konstan. Hal ini diperoleh dengan rumus :

Keterangan:

β_n = Koefisien regresi masing-masing variabel

S_{β_n} = Standar *error* dari masing-masing variabel

Hasil pengujian terhadap *t-statistik* dengan standar signifikansi $\alpha = 5\%$ adalah:

- a) Jika $\text{sig.} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini berarti bahwa ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
- b) Jika $\text{sig.} \geq \alpha$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini berarti bahwa tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan variabel terikat.

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia (BEI)

Pasar modal Indonesia pertama kali berdiri tahun 1912 di Batavia pada masa Hindia Belanda, tetapi kemudian mengalami kevakuman sepanjang terjadinya Perang Dunia I dan II. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal tersebut dengan nama Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 10 Agustus 1997. Hingga tahun 1987 baru terdapat 24 perusahaan yang *go public*. Semenjak tahun 2007 pasar modal Indonesia telah berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu penggabungan antara BEJ dengan Bursa Efek Surabaya. Saat ini sudah terdapat 463 perusahaan yang *go public*

Statistik Deskriptif

Untuk lebih mempermudah dalam melihat gambaran mengenai variabel yang diteliti dan setelah melalui proses pengolahan dengan menggunakan program SPSS, variabel tersebut dapat dijelaskan secara statistik seperti yang tergambar pada **Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (lampiran)**. Dari tabel 3 terlihat bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 165 data selama rentang tahun penelitian 2009-2011.

Variabel terikat yaitu *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* menunjukkan *mean* (rerata) 4,5030 dengan nilai maksimum 5,99 dan nilai minimum 2,48. Variabel kepemilikan institusional memiliki *mean* (rerata) -0170 dengan nilai maksimum 0,00 dan nilai minimum -0,25. Variabel Dewan Komisaris Independen memiliki *mean* (rerata) 0,394824 dengan nilai maksimum 0,6667 dan nilai minimum 0,3000. Variabel Komite Audit memiliki nilai *mean* (rerata) 3,49090 dengan nilai maksimum 5,0000 dan nilai minimum 3,0000. Variabel kualitas audit memiliki *mean* (rerata) 0,436364 dengan nilai maksimum 1,0000 dan nilai minimum 0,0000.

1. Uji Asumsi Klasik Normalitas Residual

Pengujian *normalitas residual* data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *one sample kolmogorov smirnov test*. Jika tingkat signifikansinya $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Jika tingkat signifikansinya $< 0,05$ maka data dikatakan tidak berdistribusi normal. Secara rinci hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada **Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Sebelum Transformasi (lampiran)**. Dari tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa residual belum berdistribusi normal, dimana nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Ghozali (2007) mengatakan bahwa apabila data belum terdistribusi dengan normal maka akan dilakukan transformasi data dalam bentuk *logaritma natural* baik dalam bentuk *semilog* yaitu variabel dalam bentuk *log* dan independen biasa atau sebaliknya. Kalau hasilnya masih tidak normal, maka buat bentuk persamaan menjadi *double log* atau variabel dependen dan independennya dalam bentuk *log*. Hasil pengujian setelah dilakukan transformasi dapat dilihat pada **Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi (lampiran)**. Dari Tabel 5 terlihat bahwa hasil uji menyatakan bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,754 dengan signifikansi 0,621. Dengan hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah

terdistribusi normal, karena nilai signifikansi dari uji normalitas untuk masing-masing variabel lebih besar dari α ($\alpha = 0,05$) yaitu $0,621 > 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Gejala multikolinearitas ditandai dengan adanya hubungan yang kuat diantara variabel independen (bebas) dalam suatu persamaan regresi. Apabila dalam suatu persamaan regresi terdapat gejala multikolinearitas, maka akan menyebabkan ketidakpastian estimasi, sehingga kesimpulan yang diambil tidak tepat. Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai Tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Hasil pengujian asumsi multikolinearitas untuk variabel penelitian ini dapat dilihat berdasarkan nilai VIF dan nilai Tolerancenya. **Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas (lampiran)** menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Tolerance lebih dari $0,10$ dan Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar semua variabel bebas yang terdapat dalam penelitian.

Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk mendeteksi adanya gejala heterokedastisitas digunakan uji Glejser. Apabila nilai sig $> 0,05$, maka data tersebut bebas dari heterokedastisitas. Hasil dari pengujian heterokedastisitas dapat dilihat pada **Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas (lampiran)** dimana nilai sig $0,748$ untuk variabel Kepemilikan Institusional, $0,753$ untuk variabel Dewan Komisaris Independen, $0,170$ untuk variabel Komite Audit, dan $0,135$ untuk variabel Kualitas Audit. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Dari **Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi (lampiran)** didapatkan nilai Durbin-Watson (DW hitung) sebesar $1,649$. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan DW hitung berada diantara -2 dan 2 , yakni $-2 \leq 1,649 \leq 2$ maka ini berarti tidak terjadi autokorelasi. Sehingga kesimpulannya adalah Uji Autokorelasi terpenuhi.

Model Regresi Berganda

Model regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menyatakan hubungan fungsional antara variabel bebas dan variabel terikat. Analisis regresi berganda dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Berdasarkan hasil yang terdapat pada **Tabel 9. Hasil Uji Regresi Berganda (lampiran)**, maka dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 3,128 - 0,520 (X_1) + 0,017 (X_2) + 0,390 (X_3) - 0,008 (X_4)$$

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta yang diperoleh $3,128$. Hal ini berarti jika variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) tidak ada atau bernilai nol, maka besarnya *book tax gap* (BTG) perusahaan adalah sebesar $3,128$.

b. Koefisien Regresi (β)

Nilai koefisien regresi variabel Kepemilikan Institusional (X_1) sebesar $-0,520$. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan proporsi kepemilikan institusional akan mengakibatkan penurunan banyaknya *book tax gap* (BTG) perusahaan sebesar $0,520$. Nilai koefisien regresi variabel Komisaris Independen (X_2) sebesar $0,017$. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan akan mengakibatkan kenaikan banyaknya *book tax gap* (BTG) perusahaan sebesar $0,017$.

Nilai koefisien regresi variabel komite audit dimiliki perusahaan (X3) sebesar 0,390. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan proporsi komite audit perusahaan akan mengakibatkan kenaikan banyaknya *book tax gap* (BTG) perusahaan sebesar 0,390. Nilai koefisien regresi variabel kualitas audit (X4) sebesar -0,008. Hal ini menandakan, setiap kenaikan satu satuan kualitas audit akan mengakibatkan penurunan banyaknya *book tax gap* (BTG) perusahaan sebesar 0,008.

2. Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan proporsi yang diterangkan oleh variabel independen dalam model terhadap variabel terikatnya, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model, formulasi model yang keliru dan kesalahan eksperimen. Berdasarkan **Tabel 10**. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R²* yang diperoleh sebesar 0,081. Ini berarti bahwa *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* (BTG) pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2009-2011 dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya yaitu kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, komite audit, dan kualitas audit sebesar 8,1%, sisanya 91,9% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

b. Uji *F*-Statistik

Uji *F* dilakukan untuk menguji secara keseluruhan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan kriteria pengujiannya adalah: jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $sig. < \alpha$ (0,05), maka hal ini berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $sig. > \alpha$, maka hal ini berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan variabel terikatnya. Dari **Tabel 11**. Hasil Uji *F* hasil pengolahan data menunjukkan hasil sebesar 7,081 yang signifikan pada 0,000. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($sig. 0,000 < 0,05$). Hal ini

berarti bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah *fix*.

c. Uji Hipotesis (*Uji t*)

Uji *t* dilakukan untuk mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam persamaan regresi secara parsial dengan mengasumsikan variabel lain dianggap konstan. Uji *t* dilakukan dengan membandingkan antara nilai *t* yang dihasilkan dari perhitungan statistik dengan nilai t_{tabel} . Berdasarkan hasil olahan data statistik pada Tabel 9, maka dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis 1 (Semakin tinggi proporsi Kepemilikan Institusional perusahaan maka *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* akan semakin kecil).

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah proporsi kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Berdasarkan Tabel 17 diketahui bahwa koefisien β kepemilikan institusional bernilai negatif sebesar 0,520 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,488 < 2,004$, dengan signifikansi $0,626 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap*. Dengan demikian hipotesis pertama (**H1**) ditolak.

2. Hipotesis 2 (Semakin tinggi proporsi Dewan Komisaris Independen maka *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* akan semakin kecil). Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang

diproksikan dengan *book tax gap* (BTG) pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Pada tabel 17 dapat diketahui bahwa nilai koefisien β proporsi Dewan Komisaris Independen bernilai positif sebesar 0,017 dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,029 < 2,004$, dengan signifikansi $0,977 > 0,05$. Hal ini berarti bahwa proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* pada perusahaan yang terdaftar di BEI. **Dengan demikian hipotesis kedua (H2) ditolak.**

3. Hipotesis 3 (Semakin rendah jumlah komite audit maka *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* akan semakin besar). Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* (BTG) pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Berdasarkan Tabel 17 dapat diketahui bahwa nilai koefisien β komite audit bernilai positif sebesar 0,390 dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,257 > 2,004$, dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap*. **Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) diterima.**

4. Hipotesis 4 (Semakin baik KAP/KAP big four yang digunakan maka *tax avoidance* yang diproksikan dengan akan semakin kecil). Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

Pada Tabel 17 dapat diketahui bahwa nilai koefisien β kualitas audit bernilai negatif sebesar 0,008 dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,077 > 2,004$, dengan signifikansi $0,939 > 0,05$. Hal ini berarti kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap*. **Dengan demikian hipotesis keempat (H4) ditolak.**

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil olah data statistik dapat dilihat bahwa proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,448 < 2,004$, dengan nilai signifikansi $0,626 > 0,05$ dan juga dapat dilihat β sebesar 0,520 dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional (X1) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan demikian H1 ditolak.

Ini sejalan dengan penelitian Isnanta (2008) Pemilik institusional memiliki pilihan untuk memastikan bahwa manajemen membuat keputusan yang dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional, terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap *opportunitiesnya* dalam melakukan manajemen laba.

Terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pertama, kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi diluar kepemilikan saham dewan komisaris perusahaan, dimana pemilik institusional ikut serta dalam pengawasan dan pengelolaan perusahaan namun demikian bisa saja pemilik institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris karena itu merupakan tugas mereka sehingga ada atau

tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *tax avoidance* terjadi.

Kedua, kepemilikan institusional berpikir untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka terutama pada keuntungan atau laba yang akan mereka peroleh pada perusahaan sehingga semua kegiatan yang akan merugikan perusahaan termasuk adanya pajak agresif yang akan dilakukan perusahaan, jika kegiatan itu menguntungkan bagi kesejahteraan pemilik institusional maka mereka akan tetap mendukung setiap kegiatan atau kebijakan yang akan dilakukan perusahaan sehingga besar atau kecilnya kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi tindakan *tax avoidance*.

Ketiga, pemilik institusional kurang peduli dengan citra perusahaan asalkan itu bisa memaksimalkan kesejahteraan mereka walaupun adanya perilaku manajer dalam hal mengambil suatu keputusan terutama dalam hal pajak yaitu tindakan *tax avoidance*.

Tidak sejalan dengan penelitian Shleifer dalam Annisa (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga kepemilikan institusional dapat memaksa manajer untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri tapi pemilik institusional juga bisa mempengaruhi manajer untuk dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham institusional.

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil olah data statistik dapat dilihat bahwa proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,029 < 2,004$, dengan nilai signifikansi $0,977 > 0,05$ dan juga dapat dilihat β sebesar $0,017$ dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi Dewan Komisaris Independen (X2) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dengan demikian H2 ditolak.

Terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya proporsi

Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Pertama, tidak semua anggota Dewan Komisaris Independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan *tax avoidance*.

Kedua, kemampuan Komisaris Independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan Dewan Komisaris secara keseluruhan. Ketiga, Dewan Komisaris Independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya tindakan *tax avoidance* atau pajak agresif dalam perusahaan sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara terutama pajak.

Penelitian sejalan dengan Sefiana (2010) besar atau kecilnya proporsi Dewan Komisaris Independen tidak akan mempengaruhi untuk mengurangi manajemen laba, hal ini memeberikan kesempatan bagi manajer untuk melakukan aktivitas manipulasi laba dan nantinya akan menguntungkan perusahaan dalam hal perpajakan. Ini disebabkan karena sulitnya koordinasi antar anggota dewan komisaris sehingga menghambat proses pengawasan yang harusnya menjadi tanggung jawab dewan komisaris.

3. Pengaruh Komite Audit terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan hasil olah data statistik dapat dilihat bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $4,257 > 2,004$, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan juga dapat dilihat β sebesar $0,390$ dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa komite audit (X3) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, dengan demikian H3 diterima.

Hasil olah data statistik menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

perusahaan. Tidak sejalan dengan penelitian Pohan (2008) BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit harus tiga orang, kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI, jadi jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2008). Sriwedari (2009) juga menyatakan dalam penelitiannya menjelaskan bahwa keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan agar dapat berjalan dengan baik.

Beberapa alasan komite audit perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yaitu: Pertama, jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif, begitu juga apabila semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuanganpun akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam *tax avoidance*. Kedua, kredibilitas perusahaan yang memiliki komite audit yang sedikit atau kurang dari yang ditetapkan BEI akan mempengaruhi integritas dan kredibilitas keuangan perusahaan bisa saja pajak agresif atau *tax avoidance* dapat dilakukan dengan mudah oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan Sriwedari (2009) kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari seluruh elemen dari dalam perusahaan termasuk komite audit yang bertugas dalam pengendalian kebijakan keuangan terutama dalam hal pajak di perusahaan.

4. Pengaruh Kualitas Audit terhadap *tax avoidance*.

Kualitas audit biasa diukur berdasarkan besar kecilnya ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan audit pada suatu perusahaan. Berdasarkan hasil olah

data statistik dapat dilihat bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0.077 < 2,004$, dengan nilai signifikansi $0,939 > 0,05$ dan juga dapat dilihat β sebesar $0,008$ dengan arah negatif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit (X4) berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, dengan demikian H4 ditolak. Alasan kualitas audit perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu: Pertama, perusahaan yang diaudit oleh KAP *The big four* memang lebih cenderung dipercayai oleh fiskus sebagai KAP yang mempunyai integritas kerja yang tinggi dengan selalu menerapkan peraturan-peraturan yang ada serta berkualitas, namun demikian jika perusahaan bisa memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang banyak dan lebih baik terhadap KAP tersebut bisa saja KAP yang mempunyai reputasi yang baik melakukan tindakan kecurangan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka seperti kasus enron tahun 2004.

Kedua, sebelum kasus enron pada umumnya laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *the big four* dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya sehingga memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah namun tidak dengan keadaan saat ini dimana dimata publik baik KAP *big four* maupun KAP *non big four* bisa saja melakukan tindakan kecurangan apabila perusahaan bisa lebih mensejahterakan KAP mereka karena kepercayaan publik yang telah ternodai dengan kasus enron dan tidak semudah itu bisa mengembalikan kepercayaan penuh kepada publik terhadap KAP *big four* dibanding KAP *non bigfour*. Jadi walaupun perusahaan di audit oleh KAP *big four* maupun *non big four* tetap saja kecurangan itu akan ada.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh *corporate governance* berdasarkan proporsi kepemilikan institusional, Dewan Komisaris Independen, komite audit dan kualitas audit

berdasarkan ukuran KAP terhadap *tax avoidance* dalam pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011.
2. Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011.
3. Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011.
4. Kualitas audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011.

Keterbatasan Penelitian

Pengukuran *tax avoidance* masih bersifat taksiran dan pendekatan, bukan angka yang sebenarnya karena alasan untuk mendapatkan data pajak yang dibayar sebenarnya adalah sulit dan pengukuran tersebut dikalangan ahli masih diperdebatkan serta oleh para peneliti masih dicari

DAFTAR PUSTAKA

Annisa, Nuralifmida Ayu dan L. Kurniasih. 2012. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 1, No. 1, Hlm. 1-13.

Bovi, Maurizio. 2005. *Book-Tax Gap, An Income Horse Race. Working Paper* No. 61, Desember 2005.

Darmawati, Deni. 2006. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Faktor Regulasi terhadap Kualitas Implementasi *Corporate*

kemungkinan alternatif proksi untuk ukuran *tax avoidance*.

Tingkat *Adjusted R²* yang rendah dari modal yang diuji 0,081 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap*.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya memberikan aturan yang jelas dan tegas antara penghindaran pajak yang diperbolehkan dengan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan sehingga perusahaan-perusahaan tidak berani untuk seenaknya melakukan penghindaran pajak yang menurut mereka suatu hal yang legal meskipun mereka mengetahui hal tersebut tidak diperbolehkan.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan menggunakan variabel lain yang mempengaruhi *tax avoidance* di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
3. Penelitian selanjutnya apabila data pajak penghasilan perusahaan memungkinkan untuk diperoleh, maka data tersebut dapat digunakan sebagai proksi *tax avoidance* yang lebih akurat.

Governance. Simposium Nasional Akuntansi IX. 24-25 Agustus 2006. Padang.

Desai, M. A. dan D. Dharmapala. 2007. *Corporate Tax Avoidance and Firm Value. Journal of Financial Economics*.

Dyreg, Scoot O, ; Hanlon, Michelle; Maydew Edward, 2010, *The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance, The Accounting Review*, 83, 61-82.

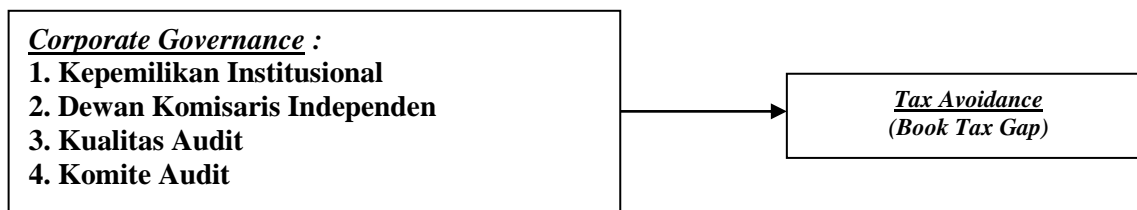
Friese, A., S. Link, dan S. Mayer. 2006. *Taxation and Corporate Governance. Working Paper*.

- Ghozali, Imam. 2009. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Edisi Keempat. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Hendra P. Irawan dan Aria Fahmita. 2010. Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. Artikel. Universitas Indonesia
- Hermanto, Dedi. 2008. Pengaruh Kualitas Auditor, Kepemilikan Manajerial dan Leverage terhadap Manajemen Laba. UNP: Padang
<http://www://pusdiklatpajak>
- Isnanta, Rudi. 2008. Pengaruh *Corporate Governance* dan Struktur Kepemilikan terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. UII: Yogyakarta.
- Khurana, I. K. dan W. J. Moser. 2009. *Institutional Ownership and Tax Aggressiveness*. www.ssrn.com
- Kurniasih, L., dan S. V. Siregar. 2007. Pengaruh Langsung dan Moderasi Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Saham Pasca IPO. Seminar Nasional Ketahanan Ekonomi. FE UPN "Veteran" Yogyakarta.
- KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*). 2006.
- Luhglatno. 2008. Analisis Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba (Studi pada Perusahaan yang Melakukan IPO di Indonesia). <http://eprints.undip.ac.id>
- Mardiasmo. 2002. Perpajakan. Edisi Revisi Tahun 2002. Yogyakarta: Andi
- Mayangsari, Sekar. 2003. Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit, serta Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Integritas Laporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.
- Muhammad Arif E. 2009. *The Power Good Corporate Governance* Teori dan Implementasi. Jakarta : Salemba Empat
- Mudjono, Bambang. 2009. Modul Seri 3 : Perencanaan Pajak. Universitas Mercu Buana
- Pohan, H. T. 2008. Pengaruh *Good Corporate Governance*, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik. <http://hotmanpohan.blogspot.com>
- Prasojo, Bagus Prio. (2011). "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap tingkat pelaporan CSR pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI". Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Sartori, Nicola. 2010. *Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance*. www.ssrn.com
- Sefiana, Eka. 2010. Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan. <http://gunadarma.ac.id>
- Sillagan, H, dan M. Machfoedz. 2006. Mekanisme *Corporate Governance*, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akutansi IX. 24-25 Agustus 2006. Padang
- Sriwedari, Tuti. 2009. Mekanisme *Good Corporate Governance*, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. <http://eprints.unsut.ac.id>
- Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Suartana, I. W. 2007. Upaya Meningkatkan Kualitas Pertimbangan Audit Melalui *Self Review Kasus Going Concern* Perusahaan. Simposium Nasional Akutansi X. 26-28 Juli 2007. Makassar.
- Sulistiyanto, H. Sri, dan Rika Lidyah, 2002, *Good Governance: Antara Idealisme dan Kenyataan*, MODUS, Vol.14 (1), Februari.
- Sujoko. 2006. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Strategi Diversifikasi, *Leverage*, Faktor *Ekstern* terhadap Nilai Perusahaan. Ekuitas Vol.11 No.2 Maret 2007
- Supramono dan Theresia W. Damayanti. 2005. Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: Andi
- Surat Direktur Jendral Pajak No. S-14/Pj. 7/2003, 2003.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007
- Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Edisi 9. Jakarta : Salemba Empat.
- Yenni Mangoting. 1999. *Tax Planing : Sebuah Pengantar sebagai Alternatif Meminimalkan*

Pajak . Jurnal Akutansi dan Keuangan, Vol. 1, No. 1, Hlm. 43-59.
 Yesika, Nina. (2013). “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Dan Karakteristik

Perusahaan Terhadap Kinerja Lingkungan”. Skripsi. Undip.
 Zain, Mohammad. 2003. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat

LAMPIRAN



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Tabel 1. Kriteria Pengembangan Sampel

Populasi	131 Perusahaan
Perusahaan yang tidak secara terus menerus melaporkan laporan keuangannya dari tahun yang diteliti	(4) Perusahaan
Perusahaan manufaktur yang laba bersih sebelum pajaknya mengalami kerugian selama tahun 2009-2011	(53) Perusahaan
Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data lengkap	(8) Perusahaan
Perusahaan manufaktur <i>delisting</i>	(4) Perusahaan
Perusahaan manufaktur dinyatakan selain rupiah	(7) Perusahaan
Perusahaan yang dapat menjadi sampel	55 Perusahaan

Sumber: www.idx.co.id website perusahaan (data diolah)

Tabel 2. Daftar Perusahaan Sampel

No	Kode	Nama Perusahaan	Bidang Usaha
1	ADMG	Polychem Indonesia Tbk	Tekstil & Garment
2	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk	Makanan dan Minuman
3	AMFG	Asahimas Flat Glass Tbk	Keramik, Porselen dan Kaca
4	APLI	Asiaplast Industries Tbk	Plastik dan Kemasan
5	ASII	Astra International Tbk	Otomatif dan Komponen
6	AUTO	Astra Otoparts Tbk	Otomotif dan Komponen
7	BRAM	Indo Krodsa Tbk	Otomotif Dan Komponen
8	BTON	Beton Jaya Manunggal Tbk	Logam dan Sejenisnya
9	BUDI	Budi Acid Jaya Tbk	Kimia
10	CEKA	Cahaya Kalbar Tbk	Makanan dan Minuman
11	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk	Pakan Ternak
12	CTBN	Citra Tubindo Tbk	Logam dan Sejenisnya
13	DLTA	Delta Djakarta Tbk	Makanan dan Minuman
14	DVLA	Darya-Varia Laboratoria Tbk	Farmasi
15	EKAD	Ekadharma International Tbk	Kimia
16	ESTI	Ever Shine Tex tbk	Tekstil dan Garment
17	ETWA	Eterinda Wahanatama	Kimia
18	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk	Pulp dan Kertas
19	GJTL	Gajah Tunggal Tbk	Otomotif dan Komponen

20	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	Rokok
21	IGAR	Kageo Igar Jaya Tbk	Plastik dan Kemasan
22	IKBI	Sumi Indo Kabel Tbk	Kabel
23	INAF	Indofarma Tbk	Farmasi
24	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	Makanan dan Minuman
25	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk	Semen
26	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk	Pakan Ternak
37	JPRS	Jaya Pari Steel Tbk	Logam dan Sejenisnya
28	KAEF	Kimia Farma Tbk	Farmasi
29	KDSI	Kedawang Setia Industrial Tbk	Peralatan Rumah Tangga
30	KLBF	Kalbe Farma Tbk	Farmasi
31	LION	Lion Metal Work Tbk	Logam dan Sejenisnya
32	LMPI	Langgeng Makmur Industri Tbk	Peralatan Rumah tangga
33	LMSH	Lionmesh Prima Tbk	Logam dan Sejenisnya
34	LPIN	Multi Prima Sejahtera Tbk	Otomotif dan Komponen
35	MAIN	Malindo Feedmill Tbk	Pakan Ternak
36	MLBI	Multi Bintang Indonesia Tbk	Makanan dan Minuman
37	MRAT	Mustika Ratu Tbk	Kosmetik dan Keperluan Rmh Tng
38	MYOR	Mayora Indah Tbk	Makanan dan Minuman
39	PBRX	Pan Brothers Tbk	Tekstil dan Garment
40	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk	Logam dan Sejenisnya
41	PYFA	Pyridam Farma Tbk	Farmasi
42	RICY	Ricky Putra Globalindo	Tekstil dan Garment
43	SIAP	Sekawan Intipratama Tbk	Plastik dan Kemasan
44	SKLT	Sekar laut Tbk	Makanan dan Minuman
45	SMCB	Holcim Indonesia Tbk	Semen
46	SMSM	Selamat Sempurna Tbk	Otomotif dan Komponen
47	SRSN	Indo Acidatama Tbk	Kimia
48	STTP	Siantar Top Tbk	Makanan dan Minuman
49	TCID	Mandom Indonesia	Kosmetik dan Keperluan Rmh Tng
50	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk	Pulp dan Kertas
51	TOTO	Surya Toto Indonesia Tbk	Keramik, Porselen dan Kaca
52	TRST	Trias Sentosa Tbk	Plastik dan Kemasan
53	TSPC	Tempo Scan Pacific Indonesia Tbk	Farmasi
54	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry&trading Company Tbk	Makanan dan Minuman
55	YPAS	YanaPrima Hastapersada Tbk	Plastik dan Kemasan

Tabel 3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LgY (BTG)	165	2,48	5,99	4,5030	,64145
LgX1 (INST)	165	-,25	,00	-,0170	,04638
X2 (INDP)	165	,30000	,66667	,3948242	,08424345
X3 (KOMITE)	165	3,00000	5,00000	3,4909091	,52519662
X4 (AUDIT)	165	,00000	1,00000	,4363636	,49744358
Valid N (listwise)	165				

Sumber: Data Sekunder SPSS 2013

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Sebelum Transformasi
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardize d Residual
N		165
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	170213,878931
Most Extreme Differences	Absolute	,73
	Positive	,200
	Negative	,200
		-,131

Kolmogorov-Smirnov Z	2,569
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000

a Test distribution is Normal.

Sumber: Data Sekunder Olahan 2013

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		165
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,60722418
Most Extreme Differences	Absolute	,059
	Positive	,059
	Negative	-,048
Kolmogorov-Smirnov Z		,754
Asymp. Sig. (2-tailed)		,621

a Test distribution is Normal

Sumber: Data Sekunder Diolah

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3,128	,399		7,830	,000		
	LgX1 (INST)	-,520	1,067	-,038	-,488	,626	,942	1,062
	X2 (INDP)	,017	,580	,002	,029	,977	,965	1,037
	X3 (KOMITE)	,390	,092	,320	4,257	,000	,993	1,007
	X4 (AUDIT)	-,008	,101	-,006	-,077	,939	,920	1,087

a Dependent Variable: LgY

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T		Sig.	
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error		
1	(Constant)	,244	,230		1,059	,291		
	LgX1(INST)	,198	,614	,026	,322	,748		
	X2(INDP)	-,105	,334	-,025	-,315	,753		
	X3(KOMITE)	,073	,053	,108	1,379	,170		
	X4(AUDIT)	,087	,058	,122	1,504	,135		

a Dependent Variable: abres

**Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,322 ^(a)	,104	,081	,61477	1,649

a Predictors: (Constant), X4, X3, X2, LgX1

b Dependent Variable: LgY

**Tabel 9. Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,128	,399		7,830	,000
	LgX1(INST)	-,520	1,067	-,038	-,488	,626
	X2(INDP)	,017	,580	,002	,029	,977
	X3(KOMITE)	,390	,092	,320	4,257	,000
	X4(AUDIT)	-,008	,101	-,006	-,077	,939

a Dependent Variable: LgY

**Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,322 ^(a)	,104	,081	,61477

a Predictors: (Constant), X4, X3, X2, LgX1

b Dependent Variable: LgY

Sumber: Data Sekunder Olahan 2013

**Tabel 11. Hasil Uji F
ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7,008	4	1,752	4,636	,001 ^(a)
	Residual	60,470	160	,378		
	Total	67,478	164			

a Predictors: (Constant), X4, X3, X2, LgX1

b Dependent Variable: LgY

Sumber: Data Sekunder Olahan 2013